

**EFEKTIFITAS ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN
KEMISKINAN MATERIAL & SPIRITUAL
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Jamaluddin

Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri

Abstrak

Entri point ajaran Islam yang berkaitan dengan zakat, bukan hanya menunjukkan kepedulian Islam terhadap kaum lemah yang tergolong mustahik, tetapi juga merupakan dimensi ketaatan transendental bagi yang menunaikannya. Hal ini ditunjukkan oleh perintah untuk membayar zakat dengan perintah untuk mengerjakan shalat. Dua dimensi ibadah yang disatukan, yaitu dimensi *spiritual* (hablun minalallah) dan dimensi *sosial* (hablun min anas). Dengan demikian di dalam ibadah zakat terdapat unsur *spiritual*, unsur *material (ekonomi)* dan unsur *sosial*.

Dari unsur *spiritual*, zakat merupakan suatu bentuk pencucian jiwa dari sifat bakhil dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari kesyirikan. Dari unsur *sosial*, zakat berorientasi untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Dari aspek material (*ekonomi*), zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta pada segelintir orang, mendistribusikan harta secara adil dan merata, mensejahterakan kaum lemah, menghilangkan dikotomi dan pemishan (*sekularisasi*) antara ibadah ritual, material, kepedulian sosial dan menghasilkan tata ekonomi yang harmonis.

Rasionalitas ekonomi kewajiban zakat yang dijelaskan dalam fiqh muamalah lebih banyak menekankan pada sudut pandang pembayar (*muzakī*), yang cenderung memberikan insentif bagi pembayar dan *disinsentif* (ancaman bagi penghindar/mengingkari) membayar zakat.

Kata Kunci : Efektifitas Zakat, Instrumen Pengentasan Kemiskinan, Material- Spritual

Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang ekonomi Islam dan keuangan syariah, namun demikian potensi besar ini tidak akan memberikan manfaat secara optimal tanpa ada dukungan dan komitmen dari berbagai pihak untuk mengembangkannya. Kajian dan penelitian mengenai peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan para peneliti, para ahli dan para pakar, terutama di negara muslim mayoritas.¹

Secara umum dari berbagai kajian dan penelitian menemukan adanya pengaruh efektifitas dan implementatif zakat terhadap penurunan kemiskinan pada tataran (tingkat) **makro** (*dampak penerimaan zakat*). Tetapi sebagian besar penelitian mengenai pengaruh zakat ada pada **level mikro**, karena adanya keterbatasan data dan kontribusi pembayaran zakat yang masih relatif rendah dibandingkan dengan perekonomian nasional (Indonesia).²

Zakat sebagai salah satu pilar dalam agama Islam nampak bergeliat semangat memperlihatkan dan mendukung perekonomian Islam (*ekonomi syariah*) yang berkeadilan, dengan menitikberatkan pada mekanisme redistribusi dalam mengatasi berbagai kesenjangan ekonomi dan soaial. Sistem zakat yang efektif disertai dengan mekanisme pemberdayaan masyarakat secara terpadu, maka akan dapat mengantarkan kesejahteraan yang lebih tinggi (*utamanya*) kepada penerima (*mustakhik*) zakat, sehingga pada gilirannya (*waktunya*) nanti akan mampu beralih mencapai tingkatan mandiri sebagai pembayar zakat (*muzakki*).³

¹ Faiz Muhammad, *Prospects of Poverty Eradication Through The Existing Zakat System in Pakistan*, http://www.Islam.com/Artide/1_41/5/112, diakses tanggal 19 Mei 2019.

² Bank Indonesia, *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Pengelolaan Zakat yang Efektif, Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: DEKS BI, P3EI-FE UII, 2015), hlm. 1

³ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, *Pengelolaan yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: P3 Fakultas Ekonomi-UII, 2016), hlm. 1

Sistem zakat yang disertai pemberdayaan yang baik, pada gilirannya (*waktunya*) secara kolektif akan mendukung tumbuhnya sentra-sentra home industri (*home industry*) yang dapat berkontribusi terhadap kesinambungan dan *inklusivitas* program pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Di beberapa negara dengan populasi muslim mayoritas sudah memulai tumbuh dan berkembang memikirkan serta menggalakkan sistem zakat, perkembangan sistem zakat secara umum masih berada tahap awal dengan kontribusi yang masih relatif terbatas, tingkat kontribusi zakat yang rendah terhadap perekonomian suatu negara disebabkan oleh belum terintegrasinya pengelolaan zakat dengan kebijakan ekonomi secara nasional, maupun pengelolaan zakat (*amil/panitia zakat*) yang belum memenuhi standart minimal prinsip tata kelola (*manajemen zakat*) yang baik dan benar, karena ada rencana dari BAZNAS Pusat bahwa seluruh personil perangkat pengurus BAZNAS dari pusat hingga ke daerah (*amil zakat*) harus melalui proses kompetensi sertifikasi, hal ini penting dalam rangka mendidik masyarakat untuk meingkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam sistem tata kelola (*manajemen zakat*) yang baik dan benar.

Dengan demikian sistem tata kelola (*manajemen zakat*) perlu memiliki kualitas tata kelola yang unggul (memiliki sertifikasi/ kompetensi) untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan melakukan penyaluran dana zakat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam rangka upaya untuk memperkuat tata kelola sistem zakat, dan seiring dengan program prioritas pemerintah Indonesia, maka dalam rangka pengentasan dan menanggulangan kemiskinan serta meperkokoh pondasi pembangunan nasional yang berkesinambungan dan inklusif.

Besar-kecilnya kontribusi (*pentasarufan*) zakat terhadap perkembangan perekonomian suatu negara, disebabkan *belum terintegrasinya* pengelolaan zakat yang maksimal (*belum optimal*) dengan kebijakan ekonomi secara nasional di suatu

negara (*pengelolaan zakat*) yang belum memenuhi prinsip tata kelola yang baik.⁴

Pembahasan

Istilah kemiskinan memiliki *spektrum* yang sangat luas, sehingga tidak ada (*belum ada*) definisi tunggal tentang itu. Persepsi tentang kemiskinan bergantung pada sudut pandang yang di kehendaki (*yang diambil*). Analisis yang berbeda dapat dilakukan dengan strategi yang berbeda, dapat diterapkan untuk memerangi kemiskinan. Oleh karena itu definisi dan kriteria kemiskinan dapat bersifat *subyektif* maupun *obyektif*.

Pada mulanya definisi kemiskinan didasarkan pada *indikator obyektif*, yaitu pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Akan tetapi perkembangan berikutnya, digunakan pendekatan kemiskinan *relatif* dan kemiskinan *absolut*.⁵ Kemiskinan *absolut* mencerminkan pendapatan layak minimum individual untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk dapat bertahan hidup.

Seangkan secara *relatif*, tingkat kemiskinan dapat diukur sebagai prosentase penduduk dengan pendapatan di bawah nilai *median pendapatan*, yang membandingkan antara kelompok terendah dan kelompok di atasnya. Sebuah contoh, 20 persen atau 40 persen lapisan masyarakat (*penduduk*) terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan atau pengeluaran. Kelompok ini termasuk penduduk *relatif miskin*. Dengan demikian ukuran kemiskinan *relatif* dan sangat tergantung pada distribusi pendapatan (*pemasukan dan pengeluaran*) pendapatan penduduk (masyarakat).

⁴ *Pengelolaan yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: P3 Fakultas Ekonomi-UII, 2016), hlm. 1.

⁵ The Statistical Economic and Social Reserdh and Tarining Centre for Islamic Countries (SESRIC), 1015, *Maesurement of Poverty in OIC Member Countries: Enhanding National Statistical Capacities*, hlm. 10

Dalam perkembangan berikutnya kemiskinan tidak dapat diukur dengan *indikator moneter*, akan tetapi juga keterlantaran (rendahnya akses barang dan jasa tertentu) dapat memicu dan memacu kemiskinan. Dalam dekade terakhir ini, kemiskinan melibatkan ruang lingkup yang lebih luas dengan memasukkan berbagai aspek sosial, budaya, pendidikan, kesehatan & lingkungan hidup.

Kemiskinan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin* disebut istilah "*fakir-miskin*". Menurut UU tersebut fakir-miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*pokok*) yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya, (*sebagai bentuk kehilangan kesejahteraan*).⁶ Kebutuhan dasar (*pokok*) dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan (*rumah*), kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

a. Kemiskinan Perspektif Islam

Kata "*kemiskinan*" dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab, yaitu kata "*miskin*". Di dalam al-Qur'an kata miskin disebut beberapa kali dalam berbagai bentuknya. *Miskin* (tunggal/mufrod), dan *masakin* (banyak/jamak). Bahkan apabila ditelusuri lebih mendalam, maka akan dijumpai berbagai istilah lain dalam al-Qur'an yang juga mengandung arti *miskin*, seperti : *al-faqir* (fakir), *al-ba'sa'* (kesulitan), *al-'ailah* (yang membutuhkan), *al-qani* (yang meminta), *al-dha'if* (orang yang tidak mampu), *as-sail* (orang yang minta-minta) dan al-mahrum (orang yang miskin tetapi tidak meminta-minta). Dengan demikian yang dimaksud miskin adalah orang yang berpenghasilan, namun

⁶ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir-Miskin*, pasal 1 ayat 1, 2011.

tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya, hal ini sesuai dengan pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i.⁷

Kata miskin berasal dari kata "*sakana*" yang berarti *diam* atau *tenang*, sedangkan kata *faqir* dari kata *faqr* yang pada awalnya berarti *tulang punggung*. Faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian beratnya (terlalu berat), sehingga "*mematahkan*" tulang punggung.

Kata *maskanah* di dalam al-Qur'an disebut sebanyak 2 (dua) kali, kata *miskin* disebut dalam al-Qur'an 11 (sebelas) kali, dan kata *masakin* 12 (dua belas) kali. Sebagai konsekuensi (akibat) dari tidak adanya definisi yang dikemukakan al-Qur'an, untuk kedua istilah tersebut di atas, maka para ulama (pakar Islam) ada perbedaan pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Para mufasirin (ulama ahli tafsir) sangat bervariasi dalam memberikan tafsir dan definisi tentang kemiskinan dan kefakiran, al. :

1. *Al-Maraghi*, memberikan pengertian bahwa *miskin* adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun, sehingga kekurangan makan dan pakaian.⁸
2. *Jalal al-Din* Muhammad bin Ahmad al-Mahalli & Jalal al-Din Abd. al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *miskin* adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya.⁹
3. *Mahmud bin Umar* al-Zamarksyart al-Khawarizmi, mengatakan bahwa *miskin* adalah seorang yang selalu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang lain, karena tidak mempunyai sesuatu apapun¹⁰.

⁷ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: P3EI Fak. Ekonomi UII, 2016), hlm. xiii.

⁸ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz X, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Audah, 1869), hlm. 142.

⁹ Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli & Jalal al-Din Abd. al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Bairut: Dar al-Ma'arifah, t.th), hlm.230.

¹⁰ Mahmud bin Umar al-Zamarksyart al-Khawarizmi, *al-Kasyaf*, Juz II, (t.p: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 33

4. **Muhammad Rasyid Ridha**, bahwa *miskin* adalah orang yang tidak dapat mampu untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹

b. Kemiskinan Islam Kontemporer.

Sejalan dengan perkembangan peradaban dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi digital, maka kemiskinan tidak serta-merta selalu dikaitkan dengan aspek pendapatan (*kekayaan*) semata. Kemiskinan lebih dimaknai sebagai bentuk yang multiaspek, yaitu kekurangan (*ketidakmampuan*) untuk mencapai sebuah kehidupan sosial yang memenuhi standar (*standar minimal*) kehidupan yang layak.

Kekurangan menunjukkan keadaan kondisi mendasar dimana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan yang lebih. Seseorang individu dianggap mungkin benar-benar dianggap kaum miskin, apabila yang bersangkutan kekurangan makanan pokok, tempat tinggal (*yang setara*) dan kekurangan penghasilan untuk membeli kebutuhan dasar.

Latar belakang pemikiran kemiskinan itu tidak terlepas dari pemikiran tentang tujuan pokok syariah (*maqasid al-syariah*). Berbagai ajaran syariah senantiasa berkaitan erat dengan urusan kemiskinan, zakat, shadaqah, bertangga dan sebagainya. Miskin selalu berkaitan dengan konsep kebutuhan hidup manusia, terutama perihal kebutuhan hidup manusia, terutama yang berkaitan lima konsep kebutuhan dasar manusia (*lima masalah*), yang meliputi : 1) Agama (*hifdz al-Din*), 2) Jasmani (*hifdz al-Nafs*), 3) Akal/Pengetahuan (*hifdz al-Aqal*), 4) keturunan (*hifdz an-Nasl*), 5) kesejahteraan materi (*hifdz al-Mal*).¹²

Dari uraian 5 (lima) jenis kebutuhan pokok hidup ini dapat diringkas menjadi 3 (tiga) versi kreteria, sbb :

¹¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Muarifah, t.th.), hlm 368.

¹² Abu Ishaq Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Vo. 3, (Cairo: Egypt, n.d. Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

1. Kebutuhan Dasar (*dharuriyyat*/necessities).
Kebutuhan dasar yang mencakup semua *aktivitas* dan semua yang yang *esensial* untuk mempertahankan kelima kebutuhan tersebut di atas, sebagai level terendah (kebutuhan minimum) untuk tingkat kebutuhan hidup yang layak. Kebutuhan dasar ini termasuk kemampuan untuk melaksanakan lima pilar Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji), melaksanakan perintah Allah swt. melindungi nyawa, menjaga makana, pakaian dan tempat tinggal, pendidikan, mencari nafkah yang halal dan thayyiban untuk membentuk sebuah keluarga.
2. Kenyamanan (*hajiyyat*/conveniencies).
Rasa nyaman (kenyamanan) itu selalu mengikuti semua hal dan aktivitas yang tidak vital untuk mempertahankan kelima kebutuhan dalam rangka untuk mengurangi beban hidup, menghilangkan kesulitan/rintangan dalam hidup dan tanggungan.
3. Kemewahan (*tahsiniyyat*/luxuries).
Tingkat kebutuhan kemewahan (*tahsiniyyat*) ini mencakup kenyamanan, kesenangan, keamanan dan kesukariaan, tidak hanya menghilangkan kesulitan dan kemadharatan, tetapi menambah kesenangan hidup. Tujuan utama pemenuhan kebutuhan hidup (kemewahan (*tahsiniyyat*) di atas adalah untuk memperindah hidup, contoh rumah indah dan mewah, mobil mewah, pakaian mewah, parfume yang mewah dsb.¹³

Kemiskinan di Negara Mayoritas Muslim

Tidak ada keseragaman di kalangan para ahli maupun negara di dalam mengukur tingkat kemiskinan, tetapi mereka memiliki perhatian yang sama tentang perlunya upaya sistematis dan terencana di dalam mengatasi kemiskinan. Bank dunia

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah*, A. Bigger's Guide, Ocasionap Paper Series 14. 2008, IIIT, London.

menyetujui bahwa untuk menghitung ukuran kemiskinan, setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang diperlukan, yaitu :

1. Harus ada **parameter (ukuran)** kesejahteraan yang relevan, jelas dan kongkrit,
2. Harus ada **ketentuan yang pasti** tentang garis batas kemiskinan, yang merupakan ambang batas bawah rumah tangga (individu tertentu) yang akan digolongkan miskin,
3. Harus ada **pilihan indikator kemiskinan** (harus di pilih indikator kemiskinan) yang akan digunakan untuk pelaporan populasi untuk mengelompokan dan memetakan subkelompok saja.

Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital, **indikator kemiskinan** tidak hanya melibatkan aspek daya beli (**ekonomi**), namun sudah bersifat multidimensi.

Indek pilihan indikator kemiskinan **multidimensi global (Multi-dimensional Poverty Indeks (MPI)** yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2010 oleh **UNDP Bank Dunia dan Oxford Poverty and Human Development Initiative**. Indek ini mengoreksi indek kemiskinan sebelumnya yang bersifat parsial, sehingga dapat terjadi tumpang tindih dalam **pengukuran kemiskinan**. Indek ini meliputi gabungan dari 3 (tiga) dimensi, yaitu :

1. **Dimensi kesehatan**, harus diukur dari tingkat nutrisi dan kematian anak.
2. **Dimensi pendidikan**, harus diukur dari lama belajarnya (studinya) dan jumlah siswa yang disekolarkannya.
3. **Dimensi standar hidup**, harus diukur dari pengeluaran bahan bakar (BBM), listrik yang digunakan (keperluan) listrik, kecukupan (kebutuhan) air yang diperlukan setiap harinya, aset yang dimilikinya, dan lain sebagainya.¹⁴

Kemiskinan di Indonesia

¹⁴Multidimensional.poverty.index, [http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty.index](http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index) mpi, diakses tanggal 23 Mei 2019.

Kemiskinan merupakan problem utama dan pertama negara dalam pembangunan Indonesia yang utuh dan mandiri hingga kini, esok dan yang akan datang, ketika program kemiskinan ini tidak dicari solusinya secara integritas dan berkesimanbungan.

Integritas program penurunan tingkat kemiskinan telah menjadi bagian agenda pembangunan nasional Indonesia semenjak negeri ini meredeka, oleh karena itu program pengentasan kemiskinan bahan dasarnya, sehingga program pengentasan kemiskinan ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan di negara tercinta ini.

Rendahnya tingkat kemiskinan sangat erat kaitanya dengan pengukuran (*indikator*) yang digunakan. Di Indonesia terdapat beberapa institusi resmi yang mengukur tingkat kemiskinan, yaitu Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kedua lembaga pemerintah ini pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di sebuah negara menggunakan kebutuhan fisik dasar minimum dengan obyek individual oleh BPS.

Sedangkan pengukuran yang digunakan oleh BKKBN adalah menggunakan pendekatan multidimensi obyek keluarga. Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia secara umum selalu menurun, baik secara absolut maupun relatif. Secara absolut jumlah penduduk miskin selalu meningkat dari tahun ke tahun (dari 34 juta jiwa, menjadi 50 juta jiwa. Sedangkan secara relatif jumlah penduduk miskin meningkat dari 17% menjadi 24%, sedangkan tingkat kemiskinan semakin menurun.

Indikator Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan sangat penting sebagai referensi kebijakan maupun kepentingan praktis. Namun demikian tidak ada pengukuran yang diterima secara universal. Secara umum indikator kemiskinan ada beberapa indikator pokok.

1) Indeks Headcount (H)

Indeks Headcount ini untuk mengukur proporsi penduduk yang masuk kategori miskin. Indeks ini sangat sederhana, namun tidak sensitif terhadap adanya perbedaan kedalaman kemiskinan.

- 2) Indeks Kesenjangan Kemiskinan (**Poverty Gap Index** (P))
Indeks kesenjangan kemiskinan ini untuk mengukur seberapa parah kemiskinan telah terjadi, mengukur jarak pendapatan rata-rata individu (rumah tangga) yang berada di bawah garis kemiskinan dengan garis kemiskinan yang lainnya. Indeks ini menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengangkat mereka dari garis kemiskinan.
- 3) Indeks Kesenjangan Pendapatan (**Income Gap Index** (I))
Indeks kesenjangan pendapatan ini ditemukan oleh Amartya Sen mengoreksi indeks kesenjangan kemiskinan dengan cara membagi gap terhadap jumlah penduduk miskin.
- 4) **Indeks Sen** (P)
Amartya Sen mengusulkan indeks untuk memasukkan dampak kemiskinan, ke dalam kemiskinan dan distribusi kemiskinan dalam pengukuran. Indeks ini menggunakan **Indeks Headcount**, indeks kesenjangan pendapatan dan indeks Gini yang digunakan untuk mengukur ke dalam kemiskinan.
- 5) **Indeks Watts** (W)
Indeks ini dikenalkan oleh **Harold W Watts** pada tahun 1968 untuk mengukur perbedaan rata-rata antara logaritma garis kemiskinan dan logaritma pendapatan. Indeks ini dapat mengukur bobot penduduk yang masuk kategori dalam garis kemiskinan.
- 6) Indeks Kemiskinan Manusia (**Human Poverty Index** (HP))
Indeks kemiskinan manusia untuk mengukur seberapa besar penduduk yang kurang beruntung dan tertinggal (**deprived people**), karena tidak mempunyai akses untuk mencapai standart kehidupan yang layak. Indeks ini dikenalkan oleh UNDP **Human Development Report** pada tahun 1997. Indeks

ini mencakup 3 (tiga) dimensi : 1) lama waktu dan tingkat kesehatan hidup (diukur usia hidup 40 – 60 tahun ke atas), 2) pengetahuan (diukur jumlah penduduk yang buta huruf), 3) kelayakan standar hidup (diukur dari rata-rata tiga keterbelakangan, yaitu Balita dengan status gizi kurang (**Balita Kurang Gizi**). Balita dengan status gizi kurang dan prosentase penduduk tidak punya akses pada pelayanan kesehatan dasar, sanitasi air bersih. Indeks ini pada tahun 2010 diganti dengan indeks Kemiskinan Multidimensional (IKM).

7) Indeks Kemiskinan Multidimensi (**Multidimensional Poverty Index** (MPI).

Indeks ini digunakan pertama kali digunakan pada tahun 2010 oleh UNDP dan dikembangkan oleh **Oxford Poverty & Human Development Initiative** (OPHI) untuk mengakses ketertinggalan dalam tiga indikator sekaligus, yaitu : Human Development Index (HDI) yang meliputi : pendidikan, kesehatan dan standar hidup, serta meliputi 10 indikator yang mencerminkan kemiskinan multi- dimensional.

8) Kemiskinan Versi **Badan Pusat Statistik** Indonesia

Untuk mengukur penduduk miskin, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (**Basic Needs Approach**). Dengan demikian pendekatan yang digunakan BPS adalah kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

9) Pengukuran Kemiskinan **Perspektif BKKBN** Indonesia.

BKKBN lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibanding dari sisi kemiskinan. BPS menggunakan analisa rumah tinggal (rumah tempat tinggal), sedangkan BKKBN menggunakan data keluarga. Terdapat 4 (empat) kelompok data yang

dihasilkan oleh pendataan keluarga, yaitu : 1) data demografi, 2) data keluarga berencana, 3) data tahapan keluarga sejahtera, 4) data keluarga pra sejahtera, sejahtera I, II, III.

Data kemiskinan dilakukan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu : 1) keluarga pra sejahtera (sangat miskin), 2) Keluarga Sejahtera I (miskin), 3) Keluarga Sejahtera II, 4) Keluarga Sejahtera III, 5) Keluarga Sejahtera III plus.

Dimensi	Indikator	Sangat kekurangan jika. ...	Bobot
Pendidikan	Tahun Sekolah	Tidak ada anggota rumah tangga usia 10 tahun/lebih yang selesai sekolah 5 tahun.	1/6
	Anak Sekolah	Anak usia sekolah yang tidak pergi ke sekolah hingga klas 8	1/6
Kesehatan	Tk. Kematian Bayi	Bayi yang mati dalam rumahtangga dalam waktu kurang dari 5 tahun.	1/6
	Nutrisi	Anak-anak dan dewasa yang kekurangan gizi	1/6
Standar Hidup	Listrik	Rumah tangga tidak memiliki listrik	1/8
	Sanitasi	Fasilitas sanitasi rumahtangga tidak diperbaiki (diperbaiki tetapi gabung dengan tetangga yang lain).	1/8
	Air Minum	Rumahtangga tidak memiliki akses	1/8

		terhadap air minum yang sehat dan bersih (perlu waktu 30 menit jalan kaki) atau lebih untuk mendapatkan air minum.	
	Lantai Rumah	Lantai rumah yang kotor dari tanah/pasir, tidak dirawat dan kumuh.	1/8
	Bahan Bakar Masak	Rumahtangga memasak dengan arang, kayu bakar & sampah (apa adanya).	1/8
	Kekayaan	Rumahtangga tidak memiliki lebih dari 1 radio, televisi, sepeda onthel, motor (almari es) dan tidak punya mobil atau truk.	1/8

• Sumber : www.ophi.org.uk/diolah.

Pandangan Islam tentang Kemiskinan

Menurut Islam, **kekayaan** adalah nikmat dan anugrah Allah swt. yang perlu dan harus disyukuri. Sebaliknya, **kemiskinan** sebagai ujian yang harus dijalani bagi si miskin ataupun si kaya. Oleh karena itu Islam menolak pandangan yang **menghinakan** atau **mengagungkan** kemiskinan.

Manusia diciptakan dalam kondisi ada yang kaya ada yang miskin, diantara mereka dalam rangka diuji ketaqwaanya. Dalam konteks ini Islam tidak melihat baik-tidaknya seseorang dari banyak atau sedikitnya harta yang dimilikinya (**disimpanya**), namun dilihat dari bagaimana harta itu diperolehnya, disimpan dan digunakannya.

Menjadi kaya (*tidak miskin*) dapat membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik, tetapi juga (*mungkin*) membawa manusia kepada kesengsaraan. Imam Ghazali mengatakan bahwa "*harta bagaikan ular yang berbisa dan penangkalnya*", manfaat dan **kegunaan** harta terletak pada *penangkalnya*, sedangkan malapetaka dan **bahayanya** terletak pada *racunnya*. Barang siapa mengetahui bahaya dan manfaatnya, maka kemungkinan akan terhindar dari bahayanya dan kejelekan harta dan mengambil kebaikannya.¹⁵

Demikian juga sebaliknya, kekurangan harta (*miskin*) merupakan ujian bagi seseorang, baik kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keinginannya, bahkan kemiskinan dapat potensi bahaya apabila tidak disikapi dengan baik dan benar. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 155 menjelaskan :

وَلَذِبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar"¹⁶ (QS. al-Baqarah, 155).

Islam mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat yang beriman agar membantu seseorang agar dapat keluar dari kemiskinan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Membantu orang miskin menjadi tanggungjawab individu maupun tanggung jawab negara. al-Qur'an menjelaskan tentang pentingnya menyantuni orang miskin sebagai bentuk peribadatan yang mulia. Al-Qur'an surat adz-Dzariat ayat 19 menjelaskan sebagai berikut :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

¹⁵ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, 204, hlm. 3

¹⁶ Departemen Agama RI., *Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1994-1998), hlm. 39.

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"¹⁷ (QS. Adz Dazriat, 19).

Kesejahteraan suatu bangsa tidak dapat serta-merta diperoleh secara alamiah, akan tetapi harus diperoleh oleh mekanisme pasar. Dalam kondisi alamiah, berbagai potensi gangguan sangat mungkin dapat terjadi, potensi gangguan sosial, politik, dan potensi ketidakadilan (*tindakan serakah*) oleh sebagian pelaku pasar dalam memberikan kompensasi, misalnya gaji dan pekerja yang tidak mencukupi kehidupan standar minimum. Hal ini tidak hanya baik menurut agama, tetapi juga oleh pasar ekonomi klasiknya demikian adanya.¹⁸

Secara literal, pembangunan (*development*) memiliki arti proses tumbuh atau berubahnya menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan memiliki dimensi yang sangat luas, bukan hanya aspek ekonomi maupun sosial, namun lebih luas dari pada itu. Untuk menghindari kesalah pahaman, pembangunan ekonomi sering dibedakan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai naiknya perekonomian yang diukur dari pendapat per kapita masyarakat di suatu negara.

Menurut ekonomi Islam, pembangunan memiliki cakupan yang lebih luas dan rentang waktu yang lebih panjang. Adul Hasan Sedeq menyimpulkan adanya 5 (lima) karakter pembangunan : 1) komprehensif, meliputi *aspek moral, spiritual* dan *material* bagi kehidupan manusia, 2) pembangunan manusia, yang meliputi *aspek fisik* dan *lingkungan sosial budayanya*, 3) adanya keseimbangan antara *sumber daya ekonomi*, 4) adanya *perubahann komunitas* dan *kualitas* dengan penekanan pada aspek perubahan kualitas, 5) adanya optimalisasi pemanfaatan

¹⁷ Departemen Agama RI., *Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 859

¹⁸ Adam Smith, *The Wealth of Nations*, (Bantam Dell, New York, 2005), hlm. 879-917.

sumber daya, keadilan dalam pemanfaatan dan distribusi sumber daya.¹⁹

Dalam pandangan Islam, pembangunan memiliki peran penting di dalam melawan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab moral dan sosial.²⁰ Seara fiqh muamalah sudah merupakan kesepakatan bersama (*ijma'*) bahwa kepedulian terhadap kaum miskin merupakan kewajiban sosial dan moral setiap orang. Secara strategis dan teknis cara penanggulangan kemiskinan merupakan wilayah perbedaan pendapat para pakar antara sarjana muslim dari berbagai perspektifnya.

Instrumen Strategi Pengentasan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan sangat berkaitan erat dengan faktor penyebabnya. Secara ringkas tulisan karya ilmiah ini akan mengkaji penyebab utama kemiskinan. Secara umum penyebab utama kemiskinan adalah :

1. ***Eksplotasi penjajah***, hampir semua negara anggota OKI baru mendapatkan kemerdekaan 2 abad yang lalu, ***kolonialisme*** telah melakukan ***eksplotasi*** besar-besaran, sistematis dan massiv telah mentransfer sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan ***teknologi*** dari berbagai aspeknya yang tidak berpihak kepada pribumi.
2. ***Dualisme ekonomi***, tingginya dualisme (***kesenjangan sosial***) dalam masyarakat yang tidak ada arah untuk mengecil dalam aspek organisasi ekonomi, teknologi dan keuangan antara ***sektor tradisional*** dan ***sektor modern***. Disadari atau tidak, dualisme ini mempersilit proses pembangunan secara ***adil dan stabil***, sering terjadi konsentrasi industrialisasi di kota-kota, kurang perhatiannya dan kepedulianya pembangunan di desa dan proses pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosial budaya.

¹⁹ Abulhasan M. Sedeq, *Development Issue in Islam*, (International Islamic: University Malaysia, 2006), hlm. 3-4.

²⁰ *Ibid*, hlm. 8

3. **Dualisme keuangan**, disamping dualisme ekonomi, ternyata adanya fragmentasi sistem keuangan di banyak negara muslim yang juga memperparah kondisi kemiskinan. Adanya dualisme keuangan modern dengan keuangan tradisional yang mengakibatkan sistem keuangan modern yang tidak dapat diakses oleh banyak anggota masyarakat. Akses usaha kecil dan mikro terhadap lembaga keuangan formal, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang maupun negara berpendapatan ekonomi rendah.
4. **Inefisiensi** dan ketidak sempurnaan. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata dan dualisme ekonomi serta keuangan, menambah sulit tercapainya mekanisme pasar yang efisien dan berkeadilan.
5. **Kesenjangan** dan **diskriminasi** antar daerah. Kesenjangan regional ini merupakan hal yang umum terjadi di berbagai negara belahan dunia, sebagai akibat dari peninggalan kolonialisasi.
6. **Produktivitas** sumber daya manusia yang rendah. Sepintas hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat pengangguran tidak nampak dan rendahnya tingkat kewirausahaan yang mandiri.²¹

Strategi dan teknis penurunan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tujuan :

1. Untuk menyusun serangkaian kebijakan (**tetentu**) dalam rangka memetakan dan menurunkan bentuk kemiskinan tertentu, misalnya kemiskinan di pedesaan, kemiskinan para petani dan nelayan, ketidak pemilikan lahan para buruh (tani, nelayan & jasa), rendahnya tingkat pendidikan, sumber daya manusia yang rendah, dan kualitas kesehatan keluarga dan lingkungan.
2. Untuk menyediakan jaminan hidup layak minimum (menggabdopsi sistem distribusi pendapatan yang adil)

²¹ Muhammad Nejatillah Siddiq, *The Guaranter of A Minimum Level of Living on Islamic State*, (The Islamic Foundation, 2002), hlm.123.

penjamin terhadap tingkat kehidupan yang layak ini bukan sekedar penetapan tingkat upah minimum, tetapi mencakup hal yang lebih komprehensif, jaminan pendapatan minimum, layanan kesehatan, akses pendidikan dan akses terhadap sumber daya ekonomi dan keuangan yang mudah.

3. Untuk menyiapkan instrumen redistribusi yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengimplementasikannya. Setidaknya ada dua konsep instrumen pengentasan kemiskinan dalam perspektif ahli fiqh, yaitu hukum waris dan zakat mal maupun zakat fitrah.
 - a. Sistem waris dan wasiat. Sistem waris merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang efektif. Implementasi secara penuh terhadap hukum waris akan menurunkan beban antar anggota keluarga dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui tiga jalan yang ditempuh. **Pertama**, sistem waris akan meningkatkan partisipasi perempuan dan generasi penerus dalam konteks ekonomi, karena perempuan diakui dapat memiliki, menggunakan aset dan bergabung dalam bisnis bersama. **Kedua**, sistem waris akan meningkatkan peluang dimulainya keluarga baru secara lebih baik, karena memberikan kesempatan kepada generasi untuk mendapatkan hak pengelolaan kekayaan. **Ketiga**, dalam hal terjadi kondisi yang tidak diharapkan, Islam melengkapi dengan sistem wasiat yang memberika peluang untuk proses redistribusi pendapatan yang lebih adil, transparan dan akuntabilitas.
 - b. Zakat merupakan kewajiban transfer yang proses distribusinya sangat dikaitkan guna menurunkan tingkat kemiskinan. Dari 8 (delapan) asnaf (delapan golongan mustahik, seluruhnya menunjukkan kelompok yang dalam kondisi lemah dan tidak mampu bermuamalah (**berinteraksi sosial ekonomi**) melalui mekanisme pasar. Namun demikian proses pendistribusian zakat ini identik dengan proses transfer pendapatan. sehingga boleh jadi

tidak efektif. Dampak pembayaran zakat ini dapat positif maupun negatif dan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Efek perbuatan baik (*good act effect*)
2. Efek penumpang gelap (*free rider effect*)
3. Efek distribusi pendapatan.²²

Zakat merupakan perintah agama yang dinilai sebagai ibadah (perbuatan baik). Tetapi indikator sukses tidaknya zakat tidak semestinya diukur dan dibayar tidaknya zakat semata, namun seberapa besar manfaat atas zakat yang dibayarkan.

Efek perbuatan baik, ini sering dijumpai bahwa para muzaki merasa sudah cukup puas dengan membayar zakat dengan tanpa memedulikan sebagai nilai manfaat dari zakat yang dibayarkan.

Efek penumpang gelap, artinya adanya sekelompok orang yang mau menikmati layanan dengan tanpa memberikan kontribusi. Hal ini dapat terjadi apabila zakat di distribusikan untuk penyediaan (*kebutuhan*) barang publik, seperti layanan dan pembiayaan (*keperluan*) tempat- tempat ibadah, pendidikan dan sosial, maka insentif untuk melakukan perawatan (*kontribusi*) sosial menjadi rendah nilai dan kompetensinya. Banyak fasilitas tempat ibadah (masjid, mushalla, surau/langgar) tidak terawat (tidak terurus), sarana pendidikan umum yang tidak laik (tidak layak) dan lembaga sosial lainnya yang sumber dananya dari hasil zakat, sebagai akibat dari adanya *free rider effect*, maka sistem manajemen distribusi zakat harus berupaya untuk menekan dari adanya *free rider effect* (efek penumpang gelap) zakat tersebut.

Efek zakat terhadap distribusi pendapatan tidak serta-merta akan menjadikan pendapatan masyarakat menjadi adil dan merata. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, distribusi faktor produksi di suatu wilayah, daerah dan negara, gaya hidup masyarakat, proporsi masyarakat penerima zakat dan lain

²² M. A. Mannan, *The Economics of Poverty in Islam With Special Reference to Muslim Countries*, 1986), hlm. 305-333.

sebagainya. Sebagai contoh, ketika masyarakat miskin sangat konsumtif dan rantai produksi barang dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, maka pelaksanaan zakat tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi redistribusi pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik dan C. Pratama, menunjukkan bahwa ada pengaruh zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan material dan kemiskinan spiritual.²³

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa efektifitas zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan material & spritual perspektif fiqh muamalah sebagai berikut :

1. Islam telah memiliki instrumen yang bersumber dari ajaran syariah (al-Qur'an dan al-Hadits) untuk mengatasi kemiskinan, berkewajiban zakat, sunnah bersedekah, infak dan wakaf atau instrumen lain yang dapat pengentasan kemiskinan material maupun spritual.
2. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang harus di atasi dalam pembangunan di suatu daerah, wilayah dan negara, berbagai strategi telah ditempuh, diusulkan dan diterapkan dalam rangka untuk menekan angka kemiskinan.
3. Pengukuran angka kemiskinan terus berkembang dengan berbagai indikator yang lebih komprehensif, sebagaimana aspek masalah, aspek material dan aspek spritual.
4. Kemiskinan dapat diukur secara absolut dan relatif. Di berbagai institusi pengukuran kemiskinan diukur dari berbagai dimensi yang berbeda-beda.

²³ Irfan Syauqi Beik dan C Prtama, *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Penurunan Tingat Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Mustakhik Berdasarkan Model CIBEST, Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi I Cet.1, (Jakarta: Rajawali Press, 2816), hlm. 101-106

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Ishaq Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Vo. 3, (Cairo: Egypt, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. t.th.
- Abulhasan M. Sedeq, *Developmant Issue in Islam*, (International Islamic: Unersity Malaysia, 2006.
- Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Bantam Dell, New York, 2005.
- Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz X, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Audah, 1869.
- Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Bantam Dell, New York, 2005.
- Bank Indonesia, *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Pengelolaan Zakat yang Efektif, Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Jakarta: DEKS BI, P3EI-FE UII, 2015.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, *Pengelolaan yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Jakarta: P3 Fakultas Ekonomi-UII, 2016.
- Departemen Agama RI., *Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1994-1998.
- Faiz Muhammad, *Prospects of Poverty Erandication Through The Ezisting Zakat Sistem in Pakistan*, <http://www.Finance in Islam.com/Artide/1-41/5/112>, diakses tanggal 19 Mei 2019.
- Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli & Jalal al-Din Abd. al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Bairut: Dar al-Ma'arifah, t.th.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah*, A. Biginner's Guide, Ocasionap Paper Series 14, IIIT, London, 2008
- Mahmuh bin Umar al-Zamarksyart al-Khawarizmi, *al-Kasyaf*, Juz II, t.p: Dar al-Fikr, 1997.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz 1, Bairut: Dar al-Muarifah, t.th.

Multidimensional.poverty.index, [http://hdr.undp.org/en/content/multi-dimensional-poverty.index](http://hdr.undp.org/en/content/multi-dimensional-poverty-index) mpi, diakses tanggal 23 Mei 2019.

M. A. Mannan, *The Economics of Poverty in Islam With Special Reference to Muslim Countries*, 1986

Muhammad Nejatillah Siddiq, *The Guaranter of A Minimum Level of Living on Islamic State*, The Islamic Foundation, 2002

The Statistical Economic and Social Reserdh and Tarining Centre for Islamic Countries (SESRIC), *Maesurement of Poverty in OIC Member Countries: Enhanding National Statistical Capacities*, 1015.

Revalion, M. S.Chen And P. Sangraula, *Dollar a Day, Word Bank Economic Review*, Vol, 23 (Z), 2008.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir-Miskin*, pasal 1 ayat 1, 2011.